

Hukum kebijakan ekonomi: pancasila dan ekosistem kerakyatan dalam menghadapi kapitalisme glombang di indonesia

Anisa Turrohmatul Maulina

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 210202110006@student.uin-malang

Kata Kunci:

Kapitalis Global, Pancasila, Ekonomi, Eksistensi, Kebijakan

Keywords:

Global Capitalism, Pancasila, Economy, Existence, policy

ABSTRAK

Studi ini mengkaji bagaimana Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam strategi perekonomiannya dalam menghadapi kapitalisme global. Pemerintah Indonesia menanggapi kekhawatiran internasional yang semakin meningkat, seperti krisis keuangan, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah dalam bentuk Undang-Undang (Perppu) sebagai landasan hukum jangka pendek untuk strategi ekonomi darurat. Tulisan ini menekankan kontribusi Pancasila dalam menjaga kemandirian ekonomi bangsa dan perekonomian kerakyatan. Berbeda dengan paradigma

kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan individu, Pancasila menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, studi ini menyoroti pentingnya UMKM dan koperasi dalam memperkuat perekonomian lokal dan perlunya kebijakan yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam menghadapi persaingan internasional.

ABSTRACT

This study examines how Indonesia applies Pancasila principles in its economic strategy in facing global capitalism. The Indonesian government responded to increasing international concerns, such as the financial crisis, by issuing a Government Regulation in the form of a Law (Perppu) as a short-term legal basis for an emergency economic strategy. This article emphasizes the contribution of Pancasila in maintaining the nation's economic independence and the people's economy. In contrast to the capitalist paradigm which prioritizes individual profits, Pancasila is the basis for developing fair and sustainable policies. In addition, this study highlights the importance of MSMEs and cooperatives in strengthening the local economy and the need for policies that encourage community economic growth in the face of international competition.

Pendahuluan

Ketika memasuki era globalisasi dapat menjadikan bangsa dan dunia hampir tidak memiliki batas, setiap zaman pasti akan ada berkembangannya globalisasi itu maka kita tidak perlu memerangi atau menjadikan musuh perkataan dari bahkan mubyarto (1999). Oleh karena itu, kita sebagai orang yang mempunyai pengetahuan lebih hendaknya tetap ekstra hati-hati dalam mengelolanya, jika tidak yakin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan mempertimbangkan pernyataan ini, tidak ada keraguan bahwa globalisasi mempunyai dampak yang sempurna dan mengerikan. Saat ini dampak tersebut sudah bisa dirasakan, khususnya dalam bidang perekonomian, perkembangan globalisasi akan diikuti dengan pemahaman para investor yang sangat individualistis dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hanya mementingkan keuntungan saja.

Lukum, R. (2013) Memahami globalisasi yang dirancang oleh negara-negara besar dapat mempengaruhi negara-negara berkembang, di lapangan Filosofi tersebut dengan cepat dilewatkan oleh hembusan angin kemerdekaan dan neoliberalisme yang menjadi fokusnya peluang individu dan bukan keuntungan semua orang. Dalam bidang politik, dari satu sudut pandang mewujudkan perkembangan demokratisasi yang layak melalui cara-cara yang diam-diam Selain itu, melakukan perubahan politik atau permusuhan juga dilakukan upaya untuk mengendalikan negara-negara yang sedang tumbuh secara strategis terlebih lagi aspek keuangan seperti neo-imperialisme atau imperialisme penyamaran. sedangkan bidang keuangan yang menonjol adalah diperkenalkannya perusahaan neo-bebas dengan ciri-ciri utamanya pengembangan modal tunai secara bebas tanpa memaksakan batas-batas publik perekonomian yang tidak diatur dan perdagangan yang efisien.

Demi ketahanan negara dan negara Indonesia di masa globalisasi, mengharapkan kita untuk menyelamatkan keutamaan Pancasila. Ini menarik untuk dikonsentrasikan bersama-sama dalam rangka landasan Pancasila bangsa kita standar koneksi dan kolaborasi bersama, sehingga masyarakat negara di masa depan dapat maju jalani dan praktikkan, dan intisari dari kualitas-kualitas terhormat itu tetap dipertahankan sebagai pembantu negara Indonesia selamanya. Kita harus senantiasa menjadikan Pancasila sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia terlebih lagi, sebagai bantuan komunikasi antar orang dan pertemuan yang ada. Namun, taklupa Nilai-nilai Pancasila pada umumnya akan ditinggalkan dalam latihan kehidupan, faktanya. Dengan demikian, kehadiran negara Indonesia yang pluralis saat ini dirusak dengan alasan tersebut peluang yang keterlaluan. Kehadiran negara Indonesia yang majemuk akan tergerus jika dasar negara dan konstitusi (Pancasila dan UUD 1945) tidak dijadikan norma atau acuan dalam berpikir dan bertindak sebagai warga negara, di tengah derasnya arus globalisasi terus terjadi. Dalam kerangka moneter, negara kita berpegang pada kerangka keuangan Pancasila.

Perekonomian Pancasila merupakan kerangka keuangan yang berorientasi kontribusi banyak individu dalam kegiatan moneter, mengenai nilai yang dikeluarkan dari penalaran Pancasila, atau urusan keuangan Pancasila, menjadi pedoman mainnya kehidupan finansial atau hubungan antara penghibur moneter yang bergantung pada Standar Pancasila. Menurut Salim, A (2019) memahami bahwa pelajaran utama dari masalah keuangan Pancasila menyatakan, persoalan keuangan tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan juga memperluas keuntungan finansial (keuntungan) dan pemenuhan (utilitas), namun lebih pada perspektif keluarga, terlepas dari ada tidaknya kerugian finansial, tidak perlu dipikirkan lagi. Gagal kalau sekaligus mendapat anggota keluarga baru (Nasihat Jawa).

Sebenarnya kewenangan Publik pada saat ini sebenarnya lebih banyak lagi fokus pada kekayaan atau kombinasi, karena agregatnya lebih dekat dengan negara dan mereka menanggung lebih banyak tugas dan tidak dapat dipungut biaya untuk memiliki posisi di suatu perusahaan, pekerjaan mereka sangat besar. Pada akhirnya, sistem individu tidak dapat membawa kemajuan bagi individu itu sendiri. Mubyarto (2002) mengatakan bahwa kerangka moneter suatu negara harus menjadi kerangka yang melayani individu

banyak, sementara kerangka moneter saat ini hanya menguntungkan organisasi-organisasi besar. Mengingat hal ini, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk membedah cara keberadaan kehadiran dari pengecualian ekonomi individu sebagai sub-kerangka moneter yang penting Pancasila menghadapi serangan perusahaan swasta di seluruh dunia.

Pembahasan

Kapitalis global

Asaribu, R. B. F. (2013) memaknai Pancasila harus dibaurkan agar yang dipikirkan dunia sebagai landasan filosofis negara Indonesia menjaga kehadirannya dan membentuk dirinya menjadi negara yang sejahtera juga, saat ini. Sebagai filosofi publik, hal tersebut patut diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan kenyataan melampaui batas negara kita sendiri. Saat dia dikandung Pasaribu, R. B. F. (2013) memahami perusahaan bebas sebagai sesuatu yang dipisahkan menjelang akhir abad ini Abad kedelapan belas dan pertengahan abad kesembilan belas, pertimbangan keuangan baru, spekulasi dan kerangka kerja disusun yang ditanamkan jiwa radikalisme, menjadi perusahaan swasta tertentu.

Adam Smith dan David Ricardo adalah tokoh yang dikenal sebagai pemikir usaha bebas. Landasan kedua pandangan mereka tidak dapat dipisahkan dari kehidupan moneter pada saat itu sistem ini berada di bawah kerangka merkantilis, yaitu kerangka moneter yang mana otoritas publik mengambil peran penting dalam membatasi aktivitas keuangan hanya pada memberi energi pada komoditas dan mencapai titik puncak impor. Ada empat bantalan eksekusi kerangka keuangan kewirausahaan Ahmad Erani Yustika (2012: 220) adalah sebagai berikut: pertama, latihan keuangan dalam rangka perusahaan swasta didorong dan disusun oleh perekonomian yang tidak diatur dengan instrumen biaya sebagai penanda (sinyal). Dengan asumsi biaya dianggap melebihi biaya penciptaan dan pendapatan keseluruhan, Ini adalah tanda bagi pelaku keuangan lainnya untuk memasuki pasar menambah stok (persediaan) barang dagangan/manfaat guna menurunkan biaya; lebih jauh lagi, sebaliknya. Kedua, setiap individu mempunyai kesempatan untuk melakukannya mempunyai hak kepemilikan (property freedoms) sebagai alasan untuk menyelesaikan pertukaran. Tanpa hak kepemilikan, orang akan selalu tidak dapat melakukan latihan ekonomi. Dengan cara ini, salah satu elemen utama dari perusahaan swasta adalah menawarkan dan menjaga hak milik pribadi. Ketiga, latihan keuangan dipisahkan oleh tiga pemilik faktor produksi, yaitu pendukung keuangan, buruh dan pemilik tanah. Pemilik modal mendapat bayaran dari tunjangan, pekerjaan dari kompensasi, dan sebagainya pemilik tanah dari sewa. Keempat, tidak ada hambatan finansial bagi para entertainer masuk dan keluar pasar.

Penghibur keuangan yang melihat manfaat luar biasa dari membuka pintu dapat melakukannya dengan mudah pasar. Selain itu, penghibur finansial yang kekurangan uang (menimbulkan kemalangan) dapat dengan mudah pergi tanpa uang tunai pedoman yang menghalanginya. Ada efek samping globalisasi sosio-sosial antar negara masyarakat antar negara menyatu menjadi satu budaya dunia, sehingga terjadilah koneksi negara-negara semakin dekat. Globalisasi umumnya dikaitkan dengan kemajuan

mekanis data, teori di pasar mata uang, perluasan aliran modal lintas batas, promosi massal, perubahan cuaca yang tidak wajar, periode perusahaan di seluruh dunia kekurangan batasan keterbatasan antar bangsa dan semakin melemahnya kekuasaan negara (Budiono, dalam Suparlan 2012). Ciri-ciri dampak globalisasi keuangan dijelaskan oleh: diperhitungkan, yang pertama dan terpenting, penerimaan moneter, khususnya perkembangan pasar, serta pergerakan inovasi di seluruh dunia, juga terdapat keterhubungan dan ketergantungan aspek keuangan, uang, pertukaran dan industri antar negara atau organisasi disebabkan oleh pengaturan organisasi-organisasi sedunia, pola ketiga bergabung dengan provinsi moneter.

Pancasila

Di masa darurat moral ini, kita harus melakukan introspeksi dan kembali mengingat dan memelihara keutamaan akhlak surgawi dan kemanusiaan yang mendalam bertindak, berpikir dan bertindak sebagai makhluk finansial (*homo economicus*) secara bersamaan dalam praktik keuangan tidak mengabaikan kualitas yang ketat, sosial dan sosial. Moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memang benar-benar ada dalam landasan negara kita lebih spesifiknya Pancasila. Makna sila-sila dalam Pancasila yang Kesatu: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai-nilai spiritual, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh umat beragama dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai tersebut berfungsi sebagai kekuatan mental, spiritual, dan landasan etika Ketahanan Nasional, sehingga ateisme tidak berhak hidup di Indonesia dalam kerukunan dan perdamaian umat beragama. Kedua Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, menutup nilai satu gelar, komitmen dan hak istimewa yang setara, cinta bersama, rasa hormat, keberanian untuk melindungi kebenaran dan kesetaraan, ketahanan dan nilai partisipasi bersama. Ketiga Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara. Keempat Sila kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, mengandung nilai kekuasaan yang dimiliki oleh individu (mayoritas memerintah pemerintahan) yang dilambangkan dengan solidaritas publik yang tulus dan masuk akal. Meskipun hal ini layak untuk dititikberatkan pada kepentingan negara/negara, namun hal ini sebenarnya memperhatikan kepentingan individu dan kepentingan bersama, dianggap dapat mencapai kesepakatan dan menjaga keluhuran serta sisi kebenaran dan kesetaraan. Kelima Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung sisi positif dari watak yang adil, penghargaan terhadap kebebasan individu dan sikap partisipasi bersama, yang menjamin bantuan pemerintah terhadap masyarakat secara keseluruhan dan layak.

Tujuan bernegara dan bernegara Menyinggung pemberlakuan UUD 1945 yaitu: (a) Semuanya menjaga segenap negeri Indonesia dan pembantaian di Indonesia; (B) Bantuan pemerintah umum di muka; (c) Mencerdaskan kehidupan negara, dan (d) Berpartisipasi Memilah dunia berdasarkan peluang, harmoni abadi, dan hak-hak sipil. Selain itu untuk menjelaskan Pasal 33 UUD 1945 juga memuat beberapa standar moneter, khususnya: (a) Perekonomian diatur sebagai suatu bisnis bersama-sama pada pedoman penyambungan; (b) Bagian ciptaan yang mengendalikan kebutuhan keberadaan banyak individu dibatasi oleh Negara; (c) Tanah, air dan aset tetap

terkandung di dalamnya yang dibatasi oleh negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin bantuan individu dari pemerintah; selanjutnya (d) Perekonomian masyarakat terkoordinasi dalam terang sistem aturan mayoritas moneter dengan standar persekutuan, produktivitas, kesetaraan, dukungan, sadar bumi, bebas, dan menjaga keseimbangan kemajuan lebih jauh lagi, solidaritas keuangan publik.

Syarat Lingkungan Peternakan Ayam

Dalam lingkungan usaha peternak ayam adalah sebuah lingkungan yang erat dengan masyarakat bahkan kesehariannya pasti bersinggungan dengan faktor lingkungan maka dari itu sebagai pengusaha ternak hendaknya menjaga yang berkaitan dengan masyarakat karena dengan adanya aspek sosial yang baik maka akan terciptanya kerjasama yang baik dari pihak masyarakat sekitar maupun lingkungan untuk meminimalisir adanya konflik sehingga dapat berjalannya usaha tersebut dengan saling menguntungkan satu sama lain

1. Menentukan lokasi peternakan

Untuk menentukan lokasi yang tepat untuk peternakan ayam ras petelur dan pedaging, harus mempertimbangkan jarak dari pemukiman penduduk, jarak dari lokasi pemasaran, jalan raya, sumber air, dan lingkungan warga sekitar.

2. Mengajukan perizinan

Izin usaha diperlukan untuk budidaya ayam petelur dan pedaging, baik dari bibit maupun komersial. Selanjutnya, perizinan dimulai dengan surat perizinan lingkungan sekitar, rekomendasi desa, izin prinsip pemerintah, izin mendirikan bangunan, AMDAL, dan izin usaha.

3. Pembangunan kandang yang ideal

Kandang ayam merupakan sebagai sarana yang penting untuk berjalannya usaha peternak ayam. Adapun prinsipnya, Kandang memiliki fungsi utama dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi ayam dan pekerja. Terlebih lagi, dengan kandang yang nyaman juga melindungi kesehatan dari berbagai faktor tekanan, terlindung dari cahaya matahari, hujan lebat, udara dingin, angin dan debu

Ekonomi Kerakyatan

Istilah dan gagasan ekonomi individu seperti yang ditunjukkan oleh Pohan, dkk (2019) adalah konsekuensi pemikiran yang disampaikan oleh Muhammad Hatta. Pemikiran ini ia tuangkan dalam sebuah makalah berjudul "Ekonomi Individu Beresiko Serius" di 1934. Artikel ini menjadi alasan pemikiran masalah keuangan individu sebagai sebuah perlawanan terhadap kerangka moneter Belanda yang dijunjung dan dibantu oleh individu berdarah biru dalam kerangka feodalisme. Kerangka moneter individu bergantung pada kekuatan individu, sedangkan perekonomian individu adalah tindakan moneter yang dilakukan melalui perbaikan diri untuk menangani aset di sekitar mereka.

Sementara itu, Arini Nurmala Sari, (2011) juga memahami kerangka tersebut Perekonomian Perorangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mengingat instrumen pasar yang adil dengan standar persaingan yang solid; (2) Fokus pengembangan keuangan, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kepuasan pribadi; (3) Siap untuk

mengakui keadaan bumi yang sehat dan kejadian yang wajar; (4) Memastikan pintu terbuka yang setara dalam bisnis dan pekerjaan; terlebih lagi (5) Kehadiran jaminan kebebasan pembeli dan perlakuan adil bagi semua individu. Kerangka Keuangan Lokal juga masuk akal bahwa otoritas publik harus mempunyai pilihan untuk melakukan hal tersebut menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan dan kemajuan dunia usaha sementara daerah setempat dinamis dalam hal keuangan. Dalam latihan keuangan yang mencakup penciptaan, diseminasi dan pemanfaatannya, masing-masing ketiganya mempunyai proses pemikiran perluasan manfaat (benefit) dan pemenuhan (utilitas). Selanjutnya, upaya untuk memperluas manfaat dan Pemenuhannya harus mengacu pada masyarakat moneter yang diarahkan oleh standar Pancasila dengan mengedepankan akhlak surgawi dan filantropis.

Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Kapitalisme

Standar hubungan keluarga tidak cukup untuk menjamin kemajuan finansial tanpanya adanya rasa patriotisme, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan bagian badan usaha swasta yang bergerak dibidang pengangkutan. Pada dasarnya ekonomi kelompok merupakan salah satu komponen kerangka keuangan, Pancasila itu sendiri yang dikenang mengandung komponen etika Pancasila seperti partisipasi bersama, hubungan kekeluargaan bersama membantu. Pedoman hubungan keluarga pada dasarnya adalah karakter negara Indonesia. Standar hak-hak sipil di bidang keuangan dikaitkan dengan keadilan antar pihak Penghibur finansial dibayangkan dalam kesadaran setiap penghibur moneter pentingnya perasaan kewajiban sosial dan ketat terhadap penghibur keuangan lainnya. Hal ini terjadi dengan membentuk asosiasi antar lembaga dan lembaga keuangan.

berdasarkan aturan koneksi. Dengan cara ini, kembangkan terus-menerus Jiwa menjauhi pelecehan dan pelecehan merupakan hal sentral yang patut dipahami juga, diakui sebagai aktivitas tulus untuk semua penghibur finansial di Indonesia. Koperasi dan UMKM tidak akan mempunyai pilihan untuk tetap eksis di dunia usaha penataan organisasi pada BUMN dan BUMS dan dikuatkan oleh otoritas publik melalui keamanan berdasarkan peraturan. Otoritas publik perlu membuat rencana permainan terlebih lagi secara eksplisit untuk usaha swasta, UKM dan UMKM, misalnya dapat dibuat pedoman yang sedikit defensif, maksudnya negara, melalui lembaga bawahannya, seperti Kantor Kantor Koordinasi Spekulasi, Ventura dan Industri di tingkat daerah/lokal dapat membuat pedoman yang lebih jelas. Misalnya pada level Permodalan dan usaha mungkin saja diawasi oleh UKM/UMKM.

Pelaksanaan urusan keuangan individu akan lebih dapat dilaksanakan jika ada instruksi darinya sejak awal hingga bangku sekolah, hal ini akan memberikan rasa patriotisme pada diri seseorang yang akan menciptakan rasa kekeluargaan yang tidak melulu tentang mencari manfaat memiliki etika keadilan. Mubyarto (2004) gaya industrialis barat homo-economicus dengan satu-satunya proses berpikir untuk meningkatkan manfaat dan kepuasan (utilitas) dari tenaga kerja dan produk terbatas, sayangnya hal ini pertama kali dididik dalam waktu yang lama. Financial schooling di Indonesia ingin mencerdaskan generasi muda negeri ini sebagai HR bagi para penghibur finansial yang senang mendengar kualitasnya kualitas finansial sangat bergantung pada falsafah

Pancasila dan UUD 1945 Padahal, pendidikan moneter kita sangat merugikan anak bangsa sendiri dari kepribadian nilai-nilai fundamental moneter Pancasila. Pada akhirnya, hal itu menjadi semakin jauh pelaksanaan aspek keuangan individu dalam praktik moneter.

Kesimpulan

Perekonomian Perorangan dalam Pancasila dan UUD 45 serta Pasal 33 adalah kerangka moneter dengan mempertimbangkan kekuatan finansial individu. Di mana Jenis perekonomian perorangan sendiri muncul sebagai koperasi dan berbagai kegiatan keuangan atau sebaliknya usaha yang dilakukan oleh mayoritas secara bebas berurusan dengan aset moneter apa pun yang dapat dia kembangkan dan kendalikan, yang mana yang selanjutnya disebut Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada dasarnya mencakup wilayah agrobisnis, peternakan, manufaktur, pangan, dan lain sebagainya, pada dasarnya menunjuk pada memenuhi kebutuhan pokoknya dan kebutuhan keluarganya tanpa mengorbankan kepentingannya jaringan yang berbeda. Kehadiran perekonomian suatu kelompok dapat diketahui dengan berfokus pada standar hubungan keluarga dan pekerjaan penghibur keuangan sebagai kaki tangan, untuk menyeimbangkan gelombang usaha bebas di seluruh dunia.

Saran

Dengan adanya artikel ini kami masih banyak belajar dan takluput dari kata sempurna dalam menyusun artikel ini, dan juga masih banyak kekurangan yang ingin kami perbaiki. Materi ketidaktahuan kita yang harus disalahkan untuk ini. Dengan ini analisis dan ide kami adalah benar-benar kami kerjakan dari membaca dari sebagai bahan penelitian kemudian.

Daftar Pustaka

- Abdi, M. N. (2020). Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 90-98. (n.d.).
- Ahmad Erani Yustika. 2014. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50-64.
- Bhudianto, W. (2012). Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian. *Transformasi*, XIV No, 22.

- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca)*, 2(02), 66-78.
- Kurniawan, M. A., Sari, D. N., & Fauziah, N. (2024). Tinjauan terhadap kebijakan Ekonomi Tiongkok sebagai pemuncak global: analisis perbandingan dengan Amerika Serikat. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 3(1), 30-38. <http://repository.uin-malang.ac.id/18218/>
- Lukum, R. (2013). Peran Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Sebagai Solusi Menghadapi Pengaruh Globalisasi.
- Mubyarto (2002), *Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi*, Jurnal Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta
- Mubyarto, (1999), *Reformasi Sistem Ekonomi (Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan)*. Yogyakarta